

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2001 "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", PT Rajaratindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011 "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi hamzah, 2017, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", edisi 2, sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006 "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014 "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013 "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2015 "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Rustanto, 2015 "*Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, "*Metodologi Penelitian*", PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Darwan Prints, 2002 "*Hukum Acara Pidana dalam praktik*", Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", Mandar Maju, Bandung
- Imam Gunawan, 2013 "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*", Bumi Aksara, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2015 "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2017 "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung.

- Ishaq, 2020 “*Metode Penelitian Hukum*”, Alfabeta, Bandung.
- Johnny Ibrahim,2017, “ *Teory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi* “,Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Kartono dalam Marzuki,2014 “*Metodologi Riset*” ,UII Press,Yogjakarta
- Lilik mulyadi,2010,”*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”,PT Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Lexy J Moleong,2002,“*Metodologi Penelitian Kualitatif*”,Remaja Rosdakarya,Bandung.
- M. Yahya Harahap,2005” *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan ,Banding,Kasasi,Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua* ”,Sinar Grafika ,Jakarta.
- Mashudi dan Sigid Suseno, 2021,”*Sidang Virtual : Idealisme,Peluang,tantangan dan Implementasinya*”,PT Kompas Media Nusantara,Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki,2006 “*Penelitian Hukum*”,kencana,Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang,2012“*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*”, Sinar Grafika,Jakarta.
- R. Subekti,2015 “*Hukum Pembuktian*”, Berita Penerbit, Jakarta.
- Rimdan, 2012,“*kekuasaan kehakiman*”, Prenada Media Group,Jakarta.
- Tolib Effendi,2014 “*Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan diIndonesia*” Setara Press,Malang.
- Tatang M. Amirin,2005 “ *Menyusun Rencana Penelitian Cet.3*”, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo,2011,”*Hukum Pidana*”,Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Jurnal Hukum :

- A.A Ngurah Wirajaya dan Nyoman Martana,2019“*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”,Univesitas udayana.
- Dinda A. Narassati ,Yonathan A.Pamungkas,dkk,2021”*Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasi E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia*”, LEGISLATIF Volume 4 Nomor 2.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, 2020“*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3.
- Fachrul Rozi,2018”*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*” Jurnal Yuridis Unaja,vol 1 no 2 ,jambi..
- Jajang Cardidi,2014” *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Perannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*”, E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science, Vol.1,No.2.
- Kadek astike,Angga alfyan ,dkk,2021,”*Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020(Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)*”,Jurnal Pro Justitia Vol.2 No.2.
- Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa,2021 “*Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid 19*”, Ganesa Civic Education Journal, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2021, Bali.
- Rizkyfia Desya,2022,“*Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Tbh*”,Borobudur Law and Society Journal,Volume 01 No. 01,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Ramiyanto,2017,”*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana Electronic Evidence As An Admissible Evidence In Criminal Law*”,Jurnal Hukum dan Peradilan,Volume 6 Nomor 3 : 463-486.
- Triantoro,2020,”*Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*”, Universitas Tidar(UNTIDAR),Magelang.

Wawancara :

Rudi Hartoyo S.H,"Wawancara Pribadi",Hakim ,27 Juli 2022,Pengadilan Negeri Kudus

Lanora Siregar S.H," Wawancara Pribadi", Hakim, 27 Juli 2022,Pengadilan Negeri Kudus

Asrofi,"Wawancara Pribadi",Panitera Muda Pidana,27 Juli 2022,Pengadilan Negeri Kudus

Situs Internet :

H.Mudjia Rahardjo,"*Metodologi Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*",Materi Kuliah Metodologi Penelitian UIN Maliki Malang,diakses pada 10 September 2022

<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi, Laporan, 2020

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)Infograsi PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik diakses melalui <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> (diakses tanggal 15 Februari 2021)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online-lt5f7e290eb1565/> diakses pada tanggal 8 oktober 2020

Elektronic justice system (e-court) Mahkamah Agung RI diakses di website

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama, diakses 27 juni 2020 ,pukul 09.23 WIB

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama, diakses 27 juni 2020 ,pukul 09.23 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara Teleconfere

Intruksi Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya

SEMA No.3 Tahun 2020 , tentang hakim dan apartur peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home/ WFH)

Keputusan Bersama No.402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Teleconference.